

**DINAMIKA GERAKAN
SERIKAT PETANI
GOWA(STUDIGERAKAN
SERIKAT PETANI BATULAPISI
KEL. MALINO
KEC.TINGGIMONCONG**

**Muh. Irwan, Dewi Anggaraini, Muh.
Ridha**

Prodi Sosiologi Agama

UIN Alauddin Makassar

muhirwan889@gemal.com

dewi.anggaraini@uin-alauddin.ac.id

muh.ridha@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk perjuangan serikat petani dalam mempertahankan tanah garapan dan menjelaskan implikasi gerakan serikat terhadap masyarakat petani. Jenis penelitian kualitatif deskripsi, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literature. Informan penelitian adalah masyarakat dan anggota serikat petani Batu Lapsi. Hasil penelitian menunjukkan konflik lahan telah berlangsung sejak tahun 2016, membuat masyarakat harus berjuang mengorganisasi diri di dalam serikat petani yang berfungsi sebagai forum konsolidasi, wadah belajar, dan redistribusi tanah lewat pengadvokasian dan pemetaan Lokasi Prioritas Revorma Agraria (LPRA) bersama Konsersium Pembaruan Agraria (KPA) dan Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS). Implikasi hadirnya serikat mempermudah petani dalam menuntut hak asasi, kedaulatan petani, dan meminimalisir permasalahan atau konflik antar petani.

Kata Kunci: Tanah Garapan, Bentuk Gerakan, Serikat Petani.

A. Pendahuluan

Konflik agraria di Indonesia telah berlangsung bahkan sejak masa kolonialisme sampai sekarang, konflik yang masih menyisahkan banyak persoalan ini tidak dapat terselesaikan, meski pemerintah memiliki kekuatan untuk menyelesaikan akan tetapi hal itu tidak diurus secara serius, termasuk penerapan UUPA tahun 1960. Salah satu dampak dari konflik itu adalah ketimpangan penguasaan lahan yang menyebabkan perebutan tanah antara rakyat dan pemlik tanah raksasa (perusahaan, Negara dan tuan tanah). Sepanjang tahun 2021 telah terjadi 207 ledakan konflik pertanahan yang tersebar ke 32 provinsi, tercatat jumlah kasus yang terjadi berdampak di sekitar 507 Desa maupun Kota. Masyarakat yang terdampak yakni sebesar 198.895 Keluarga (KK) sebagai korban, diatas lahan seluas $\frac{1}{2}$ Juta Hektar, atau sekitar 500.062, 58 Hektar.¹

¹ Abrisal "Implementasi Model Ekonomi Kelembagaan pada Baitul Maal Komunitas Jamaah An-Nadzir" *Skripsi*, (Gowa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019): h. 2-3.

Gerakan sosial menjadi wadah yang mengusahakan atau mengupayakan pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mengandalkan gerakan secara kolektif di dalam usaha merubah sistem sosial dan ketimpangan, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.² Gerakan petani pada umumnya dipelopori oleh petani-petani kecil dan penduduk desa yang tak bertanah, atau biasanya aktivis perkotaan yang terlibat dalam perjuangan dalam melawan perhutani.³

Studi yang telah ada tentang gerakan serikat petani cenderung berfokus pada beberapa aspek, pertama tentang analisis formasi gerakan sosial petani,⁴ sebagaimana dikatakan bahwa formasi struktur gerakan sosial petani dipengaruhi oleh perilaku kolektif, dan cenderung berubah ubah atas dasar ideologi dan dorongan untung rugi. Kedua, gerakan sosial petani cenderung hadir atas konflik pertambangan dan atas hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat.⁵ Wacana gerakan sosial petani didasari atas konflik yang akan menghadirkan nilai solidaritas dan tujuan dalam memelihara politik perlawanan. Ketiga, serikat petani sebagai peningkatan posisi petani sebagai nilai tawar terhadap Negara.⁶ hal ini dianggap sebagai sebuah pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dapat diperhitungkan ketika menyampaikan aspirasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang telah dilakukan, yang kurang memperhatikan bagaimana dinamika gerakan petani yang meninjau dari aspek perkembangan gerakan serikat yang selama ini belum banyak dikaji. Tulisan ini memberi informasi tentang dinamika gerakan petani dataran tinggi Gowa terkhususnya Serikat Petani Batulapisi Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong dari berdirinya sampai sekarang.

Kajian tentang gerakan serikat petani Batulapisi adalah gambaran perjuangan serikat petani dalam mempertahankan sumber daya penghidupannya yang diklaim oleh kawasan kehutanan sehingga menghadirkan suatu bentuk perlawanan sebagai tanggapan resistensi dari masyarakat setempat. Hadirnya serikat petani ini memobilisasi masyarakat dan memiliki

² Gunawan Wiradi *Reforma Agrari: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Cet.1 Insist press 2000), h.123.

³ Noer Fauzi Rachman *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Cet. II insist press, 2017), h. 2.

⁴ Wahyudi, "Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Gerakan Reklamasi Penjarahan atas Tanah PTNP XII Persero Kalibakar, Malang Selatan)" *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12, no.1 (2010).

⁵ Canra Kartiko dkk "Politik Tanah Gerakan Paguyuban Petani Lahan Petani Kulonprogo terhadap Tanah Berstatus Pakualan Ground Tanu 2016-2018" *Paradikma Polistaat Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik* Vol.3 No.2 2020. h 132-143

⁶ Desi Rahmawati, "Gerakan Petani. Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia, Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Petani Merdeka (SeTAM)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2003), h. 329-358.

agenda program kerja sebagai organisasi, mengumpulkan anak-anak muda dan membentuk kelompok dengan sebutan Petani Muda Batulapisi.

B. Landasann Teori

Berangkat dari pengertian gerakan sosial atau social movement yaitu tindakan kolektif yang muncul atas reaksi terhadap kondisi tertekan yang di rasakan oleh kelas tertindas terhadap kelas penguasa.⁷ Marx mempercayai sebagai kondisi yang tercipta atas dorongan yang akan diisi oleh semua masyarakat secara demokratis.⁸ Gerakan sosial memerlukan partisipasi gerakan yang dimobilisasi dan muncul dari gerakan yang besar, dan memiliki massa yang banyak pula. Sehingga masyarakat miskin, buruh tani, tunawisma, nelayan, dan buruh di perkotaan dapat berpartisipasi pada gerakan sosial.⁹

Gerakan serikat petani merupakan bentuk perjuangan menuju reforma agraria sejati, organisasi yang memiliki kepentingan dalam memperjuangkan hak atas tanah dan tonggak-tonggak perjuangan, menjadikan reforma agraria sebagai gerakan dalam mewujudkan keadilan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.¹⁰ Gerakan yang meliputi semangat reformasi atau disebut sebagai reform by leverage dengan memanfaatkan kebebasan berserikat sebagai perwujudan dari demokrasi, dengan partisipasi dan mandiri dalam merumuskan masalah agraria sebagai dasar pengembangan pedesaan.

Untuk memahami bagaimana jalan agar inisiatif gerakan reforma agraria bisa berjalan dan dapat terlaksana, Gunawan Wiradi mengusulkan langkah-langkah konkret sebagai pendorong untuk kesejahteraan petani kecil, yaitu; 1) gambar atau peta pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah dalam masyarakat setempat itu: seperti apa, timpang, tidak merata, penggunaannya tidak sesuai, merusak lingkungan dan sebagainya 2) melihat masalah dari luasan, distribusi, tata kerja. Namun organisasi tani atau rakyat perlu diperkuat melalui inisitif lokal, dan penyadaran kepada penguasa lokal sedikit demi sedikit dilakukan. Dengan demikian serikat petani adalah sebagai tindakan kolektif untuk mencapai keadilan dalam pendistribusian tanah.¹¹

⁷ C B Umanilo and *Materialisme Historis*, "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx", *Social and Behavioral Science* (2019): h. 1–6.

⁸ C B Umanilo and *Materialisme Historis*, "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx", *Social and Behavioral Science* (2019): h. 1–6.

⁹ Indriaty Ismail dan Mohd Zuhaili Kamal Basir, "Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial International", *Journal of Islamic Thought* 1, (2012): h. 29-30.

¹⁰ Gunawan Wiradi *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. h.12.

¹¹ yang dimaksud UUPA Tahun 1960

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Studi kasus dapat dimaknai sebagai proses serangkaian kegiatan riset ilmiah yang dilakukan secara intensif, detail dan mendalam terkait suatu masalah atau peristiwa tertentu dengan aktor individu, kelompok, orang atau lembaga untuk mendapatkan pengetahuan mendalam terkait masalah atau peristiwa tersebut.¹² Masalah atau kasus yang dipaloi adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewa. Metode studi kasus kami pilih terkait dengan beberapa argumentasi mendasar, pertama metode ini kami pilih untuk mengamati peristiwa mengenai dinamika gerakan serikat petani.

D. Pembahasan

Sejarah Singkat Batulapisi

Lingkungan Batulapisi adalah salah satu Lingkungan yang masuk pada bagian administrasi Kelurahan Malino Kec.Tinggimoncong yang terletak didataran tinggi Gowa, kita dapat menempuh perjalanan satu jam setengah, dengan menempuh jarak 63 km dari Ibukota Kabupaten Gowa. Lingkungan Batulapis adalah salah satu dari 3 lingkungan di Kelurahan Malino yang terdiri dari RW/01 dengan 6 RT, yaitu Batulapisi dalam dan Borong Nangka dan RW/02 memiliki 5 RT termasuk Kampong Beru dan Tassala, memiliki jumlah penduduk sekitar 395 kepala keluarga, yang terbagi 245 kepala keluarga di RW 01, dan 150 kepala keluarga di RW 02.

Batulapisi terdiri dari dua suku kata yaitu *Batu* dan *Lapisi*, Batu dalam Bahasa Konjo pada dasarnya juga sama dengan batu dalam pengertian yang umum, sedangkan Lapisi berasal dari bahasa konjo *Alapisi*, yang artinya lapisan atau bertumpuk kalau diartikan menjadi Batu bertumpuk. Kampung ini berdiri sejak tahun 1918 jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pada awal pembukaan kampung Batulapisi, beberapa orang yang pertama bermukim ditempat tersebut yaitu Tungguru Nontu, Tujuang, Cambang Raling, Gulung, Daeng Simung, Daeng Minu, Daeng Cileng, Daeng Nyoma, Naseh, Campe, Ali, Daeng Teku. Pada awalnya Batulapisi sendiri masuk kedalam pemerintahan adat Bulutana, yang memiliki tiga struktur pemerintahan, *sarian* (pemerintahan eksekutif), *eguru* (pemerintahan spiritual),

¹² Khairul Baharein Mohd Noor, "Case Study: A Strategic Research Methodology," *American Journal of Applied Sciences*, 2008, <https://doi.org/10.3844/ajassp.2008.1602.1604>.

dan *pinati* (otoritas pengaturan air untuk tanah garapan), struktur pemerintahan ini turun-temurun.¹³

Masyarakat Batulapisi memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah menggarap lahan yang mereka sebut *lumpa lumpa bonjeng* artinya lompat lompat seperti katak, hal itu untuk mempertahankan hidup dengan proses pencarian lahan produktif. Memilih lokasi dengan tekstur tanah yang subur, membakarnya, membuat pagar dan menanaminya, dalam satu lahan yang sama terdapat banyak jenis tanaman yang bisa dikonsumsi. Produktifitas tanah dilihat dari tumbuh subur tidaknya tanaman, ketika tanaman jagung sudah tidak tumbuh subur mereka kemudian memilih untuk pindah, selain itu mereka memutuskan untuk tinggal di sana sampai tanah menurut mereka tidak produktif lagi, ini juga menandakan kenapa orang-orang memiliki bekas tempat tinggal yang banyak, sebidang tanah datar yang di atasnya dibangun gubuk sebagai tempat tinggal.

Pada periode awalnya rumah-rumah berjarak antara satu dengan yang lainnya, dalam jangka tujuh tahun rumah itu juga sudah berjumlah tujuh, dari situlah mereka memutuskan untuk membuka dan menggali lahan persawahan, mereka kemudian memilih menanam padi tahunan yang hanya bisa dipanen satu kali satu tahun. Beras pada saat itu bisa di bilang sangat langka, beras menjadi makanan yang paling istimewa, bahkan dijadikan sebagai tabungan dan upah, pada saat masuknya tanaman padi yang bisa dipanen sekitar dua kali dalam setahun mereka kemudian massif menggarap sawah, sampai pada tempat itu sudah menjadi kampung yang di isi beberapa rumah disitulah disebut sebagai *kampung baru*, kampung yang paling baru. Hal tersebut di ungkapkan oleh Daeng Beru.

Masyarakat Batulapisi memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara subsisten memanfaatkan bibit jagung dan singkong, belakangan hadir bibit padi tahunan yang hanya dipanen satu kali dalam satu tahun, melalui pengairan dua irigasi besar di daerah Batulapisi dalam yang biasa disebut sebagai mata air *Tupontu* dan *Pitujuang*, hal ini diungkapkan oleh Dg Hakim (50 tahun) salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Batulapisi.

Tinggi Nottu dan Tujuang, irigasi ini kan mereka yang dulu yang buat Pitujuang ceritanya membuat irigasi, jadi orang memberi nama irigasi itu dengan sebutan Tujuang, yang dari luar disebut mata air Pontu, dua irigasi itumi yang masuk ke dalam di batu lapisi, itumi sejarahnya.

¹³ Ahmad Maulana Anha dan Hardianto Djanggih, Implementasi Perlindungan Hukum Hak atas Tanah terhadap Penetapan Kawasan Hutan “*jurnal of filoshofy (JLP) Volume 4, nomor 2 Desember 2023*” h 227

Sejarah Perjuangan Serikat Petani Batulapisi

Beberapa kasus yang telah terjadi pada saat konflik kawasan dan Mafia tanah hingga pada saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Batulapisi, tahun 2016 konflik kawasan kembali memanas, pada saat itu masyarakat kembali menduduki lahan mereka dan membagi baginya secara merata. Mereka terdorong untuk memanfaatkannya kembali lahan kosong dengan menanam pisang, kopi dan sebagainya. namun beberapa hari setelahnya pihak kepolisian dan tentara datang tanpa pemberitahuan kepada masyarakat dan mencabut semua tanaman yang telah mereka tanami, bukan hanya di cabut akan tetapi mereka juga memotong batang tanaman dan selang milik warga, sehingga hal itu sangat disesalkan oleh masyarakat setempat, Ungkap Pak Hakim (50 Tahun). Masyarakat kemudian melakukan protes terhadap kepolisian dengan mendatanginya dilokasi, namun tanggapan keras dari pihak aparat muncul pada saat mereka mendengar suara tembakan dua kali, masyarakat kemudian terhambur, meninggalkan lokasi tersebut.

Tahun 2018 meningkatnya pariwisata di Malino pemerintah Kabupaten Gowa kemudian berinisiatif memindahkan lapangan tembak kembali ke daerah Batulapis Dalam, namun hal itu tanpa ada persetujuan dari masyarakat, mereka mengusahakan pemindahan tersebut tanpa mencoba mempertimbangkan masyarakat yang tinggal dan bermukim di pinggir lapangan, ini juga tanpa adanya sosialisasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat setempat dan tidak melibatkannya dalam mendiskusikan kampungnya ditambah tanpa mempertimbangkan kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Tahun 2019 pematokan yang dilakukan oleh BPKH terhadap lahan masyarakat, tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masarakat, pada tahun yang sama didalam pembangunan baruga tani yang dilakukan secara berbondong bondong oleh masyarakat mendapatkan perlakuan represif terhadap salah satu anggota dari KPA yang dilakukan oleh kepolisian, namun atas kejadian tersebut masyarakat bersama KPA kemudian mendapatkan panggilan dan mediasi dengan BKSD, namun dampak tersebut mendapatkan titik terang atas pemindah tugas terhadap polisi yang bersangkutan. Masyarakat kemudian mendapatkan panggilan oleh kepolisian dengan berbentuk surat resmi, namun masyarakat enggan menghadiri karna takut untuk dipenjarakan.

Pada tahun 2020 penggusuran paksa terhadap masyarakat yang dilakukan oleh TNI, atas pemindahan paksa terhadap masyarakat yang akan dijadikan lapangan tembak. Lahan lahan tersebut dipatok tanpa adanya sosialisasi terhadap masyarakat setempat, mereka kemudian melarang dan tidak mengizinkan masyarakat untuk menggarap dan mengelola lahannya.

Tahun 2021 masyarakat kemudian dilarang beraktifitas untuk mengelola lahannya atas penerapan SK 362 oleh pihak kehutanan bersama dengan pemerintah kecamatan dan Kelurahan Malino, akibatnya salah satu warga hampir diamankan oleh pihak kepolisian karna berusaha untuk menggarap tanahnya dan mencoba menjelaskan, masyarakat kemudian diusir keluar dari lokasinya.

Bukan saja itu, sekitar tahun 2022 yang lalu sampai sekarang masyarakat yang memiliki lahan tepat didalam klaim kawasan kehutanan kini tidak menerima lagi PBB setelah mereka membayar pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak lagi mengeluarkan PBB tanpa melalui konfirmasi langsung kepada warga, hal ini menjadi keresahan warga untuk saat ini karna bukti satu satunya ditahan dan tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah Badan Pertanahan Nasional, namun untuk saat ini mereka masih membayar pajak tersebut namun surat PBBnya belum juga dikeluarkan sampai sekarang ini.

Pada kejadian ditahun 2023 telah terjadi kebakaran pada kawasan kehutanan, itu dicurigai sebagai sesuatu hal yang disengaja oleh masyarakat namun mereka tidak memiliki banyak bukti, penyelesaian konflik tersebut juga dilakukan dengan mediasi namun mereka menolak, karna mediasi tersebut diinisiasi oleh sepihak saja, mediasi tersebut juga dilakukan didaerah yang agak jauh dari pemukiman warga di salah satu rumah RT, Pak Arif selaku ketua serikat tidak menerima tawaran tersebut karna tidak melibatkan semua masyarakat dalam penyelesaiannya. Masyarakat mencurigai sekitar tujuh orang yang terlibat langsung, namun hal tersebut belum memilki cukup bukti untuk di laporkan kepada pihak terkait, mereka juga ditawari sejumlah uang, sekitar satu juta per Kartu Keluarga untuk membebaskan lahan tersebut sampai naik ke sekitaran empat juta sampai lima juta, setelah itu mereka meminta lahan sekitar dua ratus meter perorang, sehingga hal itu menurut Pak Arif sangat janggal dan tidak menanggapi hal tersebut, hal ini diungkapkan pada saat saya temui dirumahnya.

Peristiwa	Tahun	Keterangan
Pada saat itu masyarakat menduduki lahan dan membaginya secara merata, mereka memanfaatkan lahan yang kosong dengan berbagai macam tanaman,	2016	Pihak kepolisian dan tentara datang tanpa pemberitahuan kepada masyarakat dan mencabut semua tanaman yang telah mereka tanami, bukan hanya di cabut akan tetapi

seperti kopi, pisang dll.		mereka juga memotong batang tanaman dan selang milik warga
Pemetaan yang dilakukan oleh BPKH terhadap lahan masyarakat, tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, pada tahun yang sama didalam pembangunan baruga tani yang dilakukan secara berbondong bondong oleh masyarakat mendapatkan perlakuan represif oleh anggota kepolisian	2019	Tanpa adanya sosialisasi persetujuan dari masyarakat
Pada tahun yang sama didalam pembangunan baruga tani yang dilakukan secara berbondong bondong oleh masyarakat mendapatkan perlakuan represif terhadap salah satu anggota dari KPA yang dilakukan oleh kepolisian.	2019	Masyarakat kemudian mendapatkan panggilan oleh kepolisian dengan berbentuk surat resmi, namun masyarakat enggan menghadiri karna takut untuk dipenjarakan.
Pengusuran paksa terhadap masyarakat yang dilakukan oleh TNI, atas pemindahan paksa terhadap masyarakat yang akan dijadikan lapangan tembak.	2020	Lahan lahan tersebut dipatok tanpa adanya sosialisasi terhadap masyarakat setempat, mereka kemudian melarang dan tidak mengizinkan masyarakat untuk mengakses lapangan.
Masyarakat kemudian dilarang beraktifitas untuk mengelola lahanya atas penerapan SK 362 oleh pihak kehutanan bersama dengan pemerintah kecamatan dan Kelurahan Malino.	2021	Salah satu warga hampir diamankan oleh pihak kepolisian karna berusaha untuk menggarap tanahnya dan mencoba menjelaskan, masyarakat kemudian diusir keluar dari lokasinya
Masyarakat yang memiliki lahan	2022	Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak

tepat didalam klaim kawasan kehutanan kini tidak menerima lagi PBB setelah mereka membayar pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak lagi mengeluarkan PBB tanpa melalui konfirmasi langsung kepada warga.

lagi mengeluarkan PBB tanpa melalui konfirmasi langsung kepada warga, hal ini berlaku untuk lahan yang masuk dalam kawasan kehutanan.

Telah terjadi kebakaran pada kawasan hutan, itu dicurigai sebagai sesuatu hal yang disengaja oleh masyarakat namun mereka tidak memiliki banyak bukti.

2023

Penyelesaian konflik tersebut juga dilakukan dengan mediasi namun mereka menolak, karena mediasi tersebut diinisiasi oleh sepihak saja.



(a)Kebun warga Batulapisi yang masuk kedalam kawasan hutan



(b) Kebun warga Kampong Beru yang masuk ke dalam kawasan hutan

Bentuk Bentuk Gerakan Serikat Petani Gowa

a. Serikat sebagai gerakan sosial

Gerakan petani termasuk kedalam gerakan sosial baru yang bersifat transformatif yang memiliki jangka waktu perjuangan yang panjang dan melelahkan, dan berkaitan dengan isu isu yang lain seperti HAM, Lingkungan, Ras, dan Gender. Perjuangan ini hadir atas dorongan yang menyangkut persoalan hidup dan penghidupan manusia seperti dasar pola dan perilaku manusia atas perebutan sarana produksi paling dasar.

Pada perjuangan perebutan sarana produksi masyarakat Batulapisi telah memulainya pada tahun 2016, KPA masuk ke daerah Batulapis dan memobilisasi masyarakat setempat, pada tahun yang sama juga Pak Arif dan Pak Basri mengikuti munas KPA, disana mereka

mendengar salah satu program pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh presiden Jokowi, sehingga mereka kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan PBB milik masyarakat setempat, tantangan pertama yang di hadapi adalah banyaknya masyarakat yang tidak percaya karna satu satunya bukti kepemilikan akan dibawa sehingga masyarakat berfikir panjang dan sempat mencurigai bahwa hal itu akan di manfaatkan nantinya oleh orang tertentu.

1) Menjadi forum kosolidasi

Seperti cikal bakal dibentuknya serikat petani ini, didirikan atas dasar mempertahankan tanah garapan yang telah dilakukan selama konflik kehutanan dan mafia tanah yang masuk kedalam wilayah Batulapisi, ini adalah salah satu gerakan sosial yang dilakukan sehingga ini menjadi forum pertemuan membahas apa saja agenda dari serikat. Semenjak setelah di bentuk mereka telah melakukan pertemuan pertemuan dan membahas agenda agenda serikat, termasuk penyelesaian beberapa konflik yang telah terjadi dari tahun 2016 sampai sekarang.

2) Menjadi wadah belajar bagi masyarakat Batulapisi

Masyarakat memanfaatkan serikat petani ini juga sebagai ruang untuk belajar, dengan melihat susunan rencana kerja, mereka telah menyusun program seperti pelatihan untuk anak anak muda, dan pelatihan penggunaan pupuk alami pertanian, ditambah dengan rencana tambahan seperti akan mendirikan sekolah TK dan membentuk wisata yang akan menjadi sumber ekonominya, serikat ini juga mendorong masyarakat agar tidak gampang menjual tanahnya. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Pak Arif selaku ketua serikat, bahwa rencana agenda yang telah dilakukan telah menuai hasil, mereka telah merancang agenda pelatihan pertanian untuk menopang pengetahuan sebagai langkah peningkatan kesejahteraan.

3) Redistribusi tanah dan pembentukan tanah bersama

Redistribusi tanah adalah salah satu agenda Reforma Agraria yang dibawa oleh KPA, namun ini juga melibatkan serikat petani dalam pemetaan dan penentuan kawasan dalam perencanaan ini, pembagian tanah sekitar 900 Hektar lebih telah menjadi rencana pembagian untuk masyarakat, termasuk penetapan kawasan adat, namun ini belum mendapatkan titik temu pada saat mereka membahasnya, masih banyak masyarakat yang belum sepakat dengan redistribusi tersebut, dalihnya tanah tersebut telah di bagi bagi oleh nenek moyang mereka.

Implikasi Gerakan Serikat

Hadirnya serikat petani dataran tinggi Gowa, berdampak baik kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Batu Lapis, mereka dapat menggarap kembali tanahnya tanpa rasa takut, berbeda sebelum hadirnya serikat petani, mereka bahkan memiliki trauma terhadap kehutanan. Hal itu terobati pada saat mereka bisa berkumpul di dalam serikat petani tersebut, dilain sisi mereka dapat mengenal orang-orang baru seperti dari KPA dan PPSS, hal itu diungkapkan oleh beberapa masyarakat. Mereka juga memiliki harapan yang cukup besar terhadap hadirnya serikat petani ini, seperti yang diungkapkan oleh Pak Basri (57 Tahun):

Banyak saya rasa kalau harapan, paling utama itu untuk saya adalah perasaan, itu ceritanya tenangki perasaan itu yang saya lihat kunci segala galanya, baik itu usaha, urusan urusan yang lain, kita itu ituji yang paling penting, kalau itumi yang tenang bagaimana mi yang diluar kulit karna kalau diluar itu berbicara ia ada ia tidak ada, tapi kalau itu yang tenang kalau ada kerjaan pasti gampang dan ringan, karna sebab hadirnya serikat, karna di batulapisi kalau ada perlu langsung jaki bilang ada mau dikerja langsungki berkumpul disini, begitu juga baik yang mudah mudah bagusji, kalau dirasa karna banyaknya harapan di serikat”.

Hadirnya serikat juga mengurangi pihak kehutan jarang masuk kedaerah Batu Lapis, hal itu di konfirmasi oleh Pak Karim bahwa hadirnya serikat petani juga menjadi pertimbangan bagi kehutanan, karna menurutnya pertarungan klaim kehutanan itu memerlukan biaya yang sangat mahal untuk menyewa pengacara dan membiayai pengadilan, sehingga sebelumnya mereka mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil tindakan, namun setelah hadirnya serikat petani ia kemudian merasakan dampaknya lewat serikat petani tersebut ia bersama KPA telah menjadi pelindung dan relasi kepengetahuan tentang hukum seperti yang diungkapkan oleh Pak Karim (52 Tahun):

Alhamdulillah, itumi yang saya pernah sampaikan seandainya tidak ada serikat tani, orang disini habis di Batu Lapis, biar yang ditempati bangun perumahan, karena itu mafia tanah orang pintar karna mainya di atas, dan kita tidak punya uang kasian, karna mauki ambil pengacara tidak ada uang, pasti kalahki, karna dia juga yang bikin itu surat, jadi kalau kita tidak punya uang aiii... di kalahmaki, karna itumi ceritanya tadi pak ketua seandainya serikat petani tidak ada sekalimi”.

Harapan terhadap serikat tani untuk melindungi petani dari mafia tanah sangat besar, hal ini juga yang diungkapkan oleh Wawan seorang pemuda Kapong Beru, serikat petani ini menjadi wadah dan penguat bagi masyarakat karna menurutnya masyarakat ketika sudah di

hadapkan dengan aparat mereka sudah takut dan tidak tau mau berbuat apa, Wawan (26 Tahun):

Seandainya memang tidak ada itu serikat petani kita disini aiii habiski, kalau itu masalah tanah, kalau di gertakmi satu kali polisi takut maki untuk bercerita, sama waktunya disana ada sekitar 62 hektar, termasuk itu yang dikelola Karaeng Situju, tidak ada sampai sekarang titik terangnya”.

Begitupun dampak hadirnya serikat petani membawa perubahan terhadap relasi sosial, mereka belajar berkumpul dalam membahas yang paling mendasar dari kehidupannya, yaitu sumber daya lahan yang kian menipis akibat dari dampak alifungsi hutan yang membatasi masyarakat untuk mengakses kembali tanahnya, seperti harapan dari anak anak muda seperti Salam ia mengungkapkan harapannya, selama menggarap dan tidak menghabisi pinus, kehutanan tidak akan mengganggu mereka, Daeng Ngunjung (29 Tahun):

Itu salah satu kebaikannya, kan selama digarapki dan tidak dihabisiji pinusnya tetapji digarap, samami itu yang di Batulapisi karna kalau orang luar yang mau beli otomatis banyak lagi yang ikuti untuk menjual dan kalau habiski berdampakki juga, untuk satu tahun dua tahun itu baguski karna ada lowongan kerja kalau orang bangun Villa, tapi lima tahun kedepan untuk anak cucu tidak adami mau maki kemana, sama di batu lapis karna kalau bilangki semua penginapan disana sudah ratusan, untung itu kalau dalam satu bulan ada penginapan, karna tanah mami yang di harapkan jadi asset”.

Dg Unjung coba menjelaskan bagaimana serikat petani menjadi salah satu pertimbangan bagi kehutanan untuk melarang mereka untuk kembali menggarap tanahnya, karna dulu kasus tersebut sensitive dan membuat masyarakat takut kembali menggarap tanah tersebut, sekalipun dulunya mereka bahkan tidak bisa kembali kelahan tersebut bahkan ketika tidak menyentuh sama sekali pohon pinus, dari pertimbangan itu juga menurut Pak RT Tamrin mengungkapkan, bahwa mereka sudah bermitra langsung dengan kehutan dengan hadirnya kelompok tani hutan.

E. Penutup

Serikat petani telah mengukuhkan satu gerakan sosial yang memiliki struktur inti seperti ketua sekertaris dan bendahara yang di SK oleh PPSS dan KPA, namun serikat petani memiliki anggota yang loyal dalam setiap agenda pertemuan, meskipun agenda itu bukan didorong atas inisitif mereka melainkan sebagi pengawalan dari organisasi seperti PPSS dan KPA. Gerakan serikat sebagai gerakan sosial bisa dilihat dari beberapa agenda yang telah

dilakukan, yaitu menjadi forum pertemuan dan konsolidasi dan menjadi tempat berkembang bersama lewat pelibatan keanggotaan di dalam pemetaan PLRA, dan mengadakan sekolah bagi petani muda Batu Lapsi.

Hadirnya serikat petani telah menjadi harapan baru bagi masyarakat Batul Lapsi, sebelum hadirnya serikat petani mereka telah menghadapi konflik dan tidak memiliki keberanian didalam menghadapi kehutanan dan mafia tanah, karna beberapa pertimbangan yang tidak berani mereka putuskan. Gerakan sosial yang hadir telah memberikan kekuatan baik secara idividu dan sebagai kelompok dalam menghadapi persoalannya, sejauh ini masyarakat menetapkan harapan-harapan mereka kepada perserikatan ini, meskipun beberapa dinamika telah mereka lalui dengan berbagai persolan di dalam internalnya. Begitupun sebagai penguat dari perlawanan yang dilakukan secara sendiri sendiri dengan menanami lahan lahan mereka dengan tanaman kopi, cengkeh, dan markisa dan tanaman lainnya, sebelum hadirnya kelompok tani hutan yang dimobilisasi oleh kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrisal. Implementasi Model Ekonomi Kelembagaan pada Baitul Maal Komunitas Jamaah An-Nadzir, Gowa 2019
- Anha, Ahmad Maulana dan Hardianto Djanggih. Implementasi Perlindungan Hukum Hak atas Tanah terhadap Penetapan Kawasan Hutan "*jurnal of filoshofy (JLP) Volume 4, nomor 2desember 2023*"
- Hartoyo."Dinamika Gerakan Petani di Organisasi Serikat Petani Lampung." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26. no.3 (2013)
- Ismail Indriaty dan Mohd Zuhaili Kamal Basir. "Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial International", *Journal of Islamic Thought* 1, (2012)
- Kartiko Canra dkk. "Politik Tanah Gerakan Paguyuban Petani Lahan Petani Kulonprogo terhadap Tanah Berstatus Pakualan Ground Tanu 2016-2018" Paradikma POLISTAAT *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik* Vol.3 No.2 2020
- Rachman, Noer fauzi. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* Yokyakarta,insist press, 2017

Rahmawati, Desi. "Gerakan Petani. Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia, Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Petani Merdeka (SeTAM)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2003),

Umanailo C B And Materialisme Historis. "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx", Social And Behavioral Sciense (2019).

Wiradi, Gunawan Reforma. *Agrari: Perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta Insist press 2000

Wahyudi. "Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Gerakan Reklaiming Penjarahan Atas Tanah PTNP XII Persero Kalibakar, Malang Selatan)" *Jurnal Masyarakat dan budaya* 12, no.1 (2010).